

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan dibagi menjadi permasalahan tingkat daerah dan per-urusan pemerintahan. Permasalahan tingkat daerah terkait dengan persoalan-persoalan makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan, sedangkan permasalahan per-urusan adalah persoalan yang dihadapi oleh satu atau beberapa urusan pemerintahan di tingkat provinsi.

4.1.1. Permasalahan Tingkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, terdapat lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: lambannya transformasi ekonomi menuju sumber daya alam berkelanjutan, masih belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia, belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta belum tercapainya pelayanan publik yang optimal. Kelima permasalahan utama tersebut merupakan permasalahan pembangunan lintas sektor yang menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

1. Belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah daya saing sumber daya manusia. Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kalimantan Timur dari sisi SDM tentunya masih menyisakan tantangan yang harus segera diatasi. Aspek daya saing seringkali diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mengukur berbagai aspek terutama pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kalimantan Timur sudah lebih *baik* dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, serta rata-rata nasional. Namun demikian, bila dilihat daya saing antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur, maka akan terlihat adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal.

Belum optimalnya daya saing SDM Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Di samping itu, Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kalimantan Timur lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang

sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera. Oleh karena itu, program percepatan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat ditetapkan dan diterapkan melalui pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakat miskin, termasuk dalam hal pemberian subsidi yang tepat guna.

Belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

Terkait dengan ketenagakerjaan bahwa perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis, yang membutuhkan tenaga kerja bukan saja terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional. maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Pemerintah mengkondisikan penciptakan pasar kerja yang sesuai dengan tuntutan global.

sedangkan kawasan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten, baik transmigrasi lokal maupun transmigrasi di luar Kalimantan. dalam rangka meningkatkan di kawasan transmigrasi perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

2. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016 , namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. LPE Kalimantan Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batu bara) akibat terjadinya penurunan harga batu bara di level internasional.

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Sektor Kehutanan masih belum mengoptimalkan produktivitas kawasan yang telah diperuntukan untuk hutan produksi. Pada produksi hutan alam, produktivitas setiap tahun berada pada angka 30 m³/tahun dengan total produksi 2,0-2,6 juta meter kubik per tahun. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta hektare peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin perkebunan yang diterbitkan 2,76 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,35 juta hektare, termasuk 1,1 juta hektare kelapa sawit. Masih terdapat 1.41 juta Ha areal ijin perkebunan yang belum ditanami. Demikian pula di sektor pertambangan batubara dan mineral lainnya, luas areal yang di beri ijin 4,8

juta Ha tetapi yang dieksploitasi hanya seluas \pm 130 ribu Ha atau hanya 2,7% dari total luas IUP yang diberikan.

Industri hilir pertanian dalam arti luas juga belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi crude palm oil (CPO), walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Pembangunan juga belum berjalan merata, di mana masih tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Indeks ketimpangan regional terus menunjukkan tren penurunan selama 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014-2015 indeks Williamson mengalami penurunan sebesar 0,03. Angka ini tetap hingga tahun 2015. Berdasarkan analisis terhadap data “PDRB Atas Harga Konstan Seri 2010 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 Berdasarkan Kabupaten/Kota”, indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara.

3. Belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke sentra produksi

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas yang baik menuju pusat produksi dan pemasaran serta kawasan strategis provinsi. Hal ini disebabkan karena rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan ketenaga listrikan.

Dilihat dari kondisi jalan, tahun 2017 kondisi mantap jalan Provinsi hanya mencapai 51,66%. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang belum sepenuhnya memberikan dukungan untuk peningkatan layanan transportasi dalam mendukung mobilitas orang, barang dan jasa. Demikian pula pada transportasi darat yang masih memiliki fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang minim sehingga menyebabkan fatalitas kecelakaan semakin meningkat.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. Masih terdapat 6 titik kawasan pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan backlog kepemilikan dan penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya. Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi telah mencapai 84,7%.

Persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota dan belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup,

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah

dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan pada alur perairan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman. Informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun. Sementara itu, emisi GRK dari sektor energi terus mengalami penurunan kecuali tahun 2014 yang sedikit meningkat dibanding 2013.

5. Belum tercapainya pelayanan publik yang optimal

Tata kelola pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, responsivitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pelayanan prima. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik juga terkait hubungan antar aktor di dalam daerah, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah. Akuntabilitas administratif di dalam pembangunan daerah setidaknya terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Capaian akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2017 adalah “BB”, sementara peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat 3 menjadi peringkat 7 nasional dengan status “Sangat Tinggi”. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Meskipun demikian, masih ada persoalan asset yang belum terselesaikan akibat pelimpahan wewenang.

Indikator akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif, sedangkan indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan

akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016

Pelaksanaan prinsip transparansi terkait tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah diharapkan semakin terbuka dalam berhubungan dengan masyarakat, dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan. Gagasan One Map One Data serta Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan bagian yang perlu diperkuat. Upaya menjalankan transparansi juga berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, yakni ketika pemerintahan semakin terbuka diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah. Capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi public. Capaian indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat 3 pada tahun 2016 menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Adapun indeks persepsi korupsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 5,58 pada tahun 2016 menjadi 5,56 pada tahun 2017. Standar layanan informasi publik perlu semakin dikuatkan, agar interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin bisa didekatkan.

Prinsip partisipasi ditandai oleh keaktifan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemerintah. Capaian pembangunan pada prinsip partisipasi dapat dilihat dari indeks demokrasi. Indek yang bersifat komposit tersebut menilai capaian kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,14 pada 2015 menjadi 73,64 pada 2016.

Capaian indikator-indikator di atas di satu sisi memperlihatkan keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada sisi lain juga masih menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini karena tata kelola pemerintahan merupakan realitas

kompleks yang terkait kapasitas kelembagaan, kapasitas personal aparaturnya pemerintahan, hingga struktur kesempatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan daerah pada tata kelola pemerintahan merentang dari berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, dan urusan penunjang.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Per-Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan per-urusan menjadi basis utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis. Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan per-urusan juga dipetakan berbasis pada sinergitas RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbasis pada logika tersebut, maka pemetaan masalah per-urusan disusun berdasarkan pendekatan *vision based* (merujuk pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur) dan *problem based*.

1. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi basis utama bagi perumusan isu strategis. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
--------	---------------	---------	--------------

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan	Kualitas pendidikan masyarakat belum optimal	Masih tingginya disparitas pelayanan pendidikan	Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Belum meratanya dan belum terpenuhinya kualitas pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
			Masih belum terfasilitasinya peserta didik dari keluarga miskin, disabilitas dan pekerja anak
			Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik kualifikasi S1
			Kurangnya fasilitas pendukung pendidikan kejuruan (alat-alat lab, jaringan wifi, komputer, listrik)
		Masih Rendahnya minat baca	Belum maksimalnya pembinaan perpustakaan Kab/Kota Kebudayaan
Kesehatan	Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal	Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di pusat-pusat pelayanan kesehatan	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata
			Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
			Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih rendahnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Konstruksi jalan dan jembatan belum sesuai standar keamanan dan kenyamanan
			Belum optimalnya penanganan/rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
		Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan strategis	Belum terhubungnya ibukota Kabupaten Mahulu dengan jaringan jalan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		provinsi	Belum semua kawasan strategis provinsi terhubung jalur darat secara baik
		tingginya pelanggaran pengguna jalan terhadap ketentuan batas muatan kendaraan maksimal	Belum optimalnya pengawasan batas muatan
	Rendahnya kualitas konstruksi infrastruktur	Belum optimalnya sistem pengawasan konstruksi bangunan	Belum terpenuhinya SDM tenaga konstruksi yang sesuai standar kompetensi
	Adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Belum disusun dan ditetapkannya Perda terkait RTRR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
			Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
			Lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan fisik dan pengembangan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari rencana tata ruang
	Masih rendahnya luas lahan pertanian beririgasi teknis	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi	Belum optimalnya fungsi bendungan
			Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
			Masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi
			Ketersediaan jaringan irigasi tidak sesuai dengan lokasi lahan pertanian strategis

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting dan ketersediaan jaringan irigasi, terutama data spasial
	Belum optimalnya akses air bersih masyarakat	Kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan	Belum tersedianya infrastruktur SPAM regional
		Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air bersih	Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur air baku
	Tingginya kejadian banjir di Samarinda, Balikpapan dan Bontang	Infrastruktur pengendali banjir belum memadai	Rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai
			Belum optimalnya fungsi bendali, folder dan drainase
			Pembangunan infrastruktur pengendali banjir bersifat parsial dan penanganan hulu hilir tidak terintegrasi
			Banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai
		Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan dan membantu mengurangi resiko banjir	Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan resiko banjir
	Tingginya laju abrasi pantai	Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai	Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai
	Tingginya volume sampah	Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum tersedianya TPA Regional
Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Masih rendahnya akses Masyarakat miskin terhadap rumah layak huni	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya kualitas lingkungan kawasan pemukiman	Kurangnya ketersediaan drainase
			Kurangnya ketersediaan sanitasi layak
			Ketersediaan jalan lingkungan belum memadai
			Kurangnya pelayanan air bersih perpipaan
			Belum optimalnya upaya penataan kawasan pemukiman di sempadan Sungai Karangmumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Rapak Dalam
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya kualitas demokrasi daerah	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat
			Belum optimalnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat
	Masih Tingginya tingkat kriminalitas	Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitas	Terbatasnya ketersediaan Satuan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat
			Belum optimalnya penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, hukum, dan agama
	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana	Belum optimalnya sistem penanggulangan kebencanaan	Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam menanggulangi bencana
			Masih rendahnya infrastruktur kebencanaan
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan
Sosial	Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial
			Terbatasnya fasilitas pelayanan panti sosial

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pengendalian migrasi PMKS dari luar daerah
			Terbatasnya ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

Tabel 4.2.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kebudayaan	Lemahnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya lokal	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang penting pelestarian dan pengamalan kebudayaan lokal
			Belum optimalnya peran sekolah terhadap pendidikan kebudayaan
			Belum optimalnya penguatan lembaga adat dalam pelestarian budaya lokal

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi budaya masyarakat	Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya local
Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya penanganan kepemudaan dan olahraga	Belum optimalnya ruang kreatif bagi pemuda
			Masih belum optimalnya prestasi pemuda dalam olahraga dan seni budaya
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender belum optimal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan gender
			Masih rendahnya kerjasama dan pelibatan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender
			Belum optimalnya kelembagaan unit layanan terpadu penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
	Masih tingginya jumlah pekerja anak	Belum optimalnya perlindungan anak	Belum berkembangnya layanan publik ramah anak
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Belum optimalnya pengembangan desa mandiri	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping desa di daerah pedalaman
			Belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
			Belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pembangunan desa belum terintegrasi antar sektor
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan anggaran desa
			Belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan desa
Perhubungan	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi
			Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam keselamatan berlalu lintas dan ketentuan muatan maksimal
			Belum memadainya sarana dan prasarana terminal
		Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan	Terbatasnya fasilitas keselamatan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan
			Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar
			Terbatasnya dermaga yang sesuai standar
		Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi, terpadu dan memadai	Belum tersedianya moda transportasi yang terintegrasi melalui pemadu moda
Komunikasi dan Informatika	Masih rendahnya akses pelayanan jaringan komunikasi dan informasi	Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi	kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan
		Belum optimalnya layanan informasi publik	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya PPID

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum terintegrasinya aplikasi layanan informasi publik
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan UMKM masih rendah	Minimnya kompetensi kewirausahaan
			Kurangnya inovasi produk UMKM yang mampu berdaya saing secara nasional dan internasional
			Kurangnya akses permodalan
			Rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha
			Belum tumbuhnya inkubasi bisnis
			Masih terbatasnya koperasi produksi (koperasi yang beranggotakan IKM produksi)
Ketahanan Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan (terutama beras)	Rendahnya akses pangan dan produktivitas lahan penghasil pangan	Panjangnya rantai distribusi pangan (dari luar daerah maupun ke dalam daerah)
			Belum optimalnya diversifikasi pangan, Pangan utama masih tergantung pada beras (padi)
			Rendahnya aksesibilitas distribusi pangan ke beberapa daerah
			Belum optimalnya perlindungan lahan pertanian pangan
	Produksi daging (sapi) belum memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada)	Masih rendahnya populasi ternak sapi	Bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak masih belum dilakukan secara mandiri

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya kompetensi peternak
			Terjadinya beberapa penyakit hewan
			Usaha peternakan masih berskala rakyat. Belum ada usaha peternakan besar
			Rendahnya jumlah peternak
Penanaman Modal	Belum optimalnya nilai investasi sektor sekunder dan tersier	Minat investasi pada sektor sekunder dan tersier masih rendah	Promosi investasi belum optimal
			terbatasnya ketersediaan informasi detail peluang investasi
			Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi
	Kawasan strategis ekonomi belum memberikan daya tarik investasi	Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi belum optimal	Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor
			Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan
			Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih terbatas
			Keterbatasan infrastruktur pendukung (jaringan jalan, pelabuhan, air n bersih, listrik, telekomunikasi)
Tenaga Kerja	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal	Rendahnya kualifikasi tenaga kerja
			Rendahnya kualitas tenaga kerja
			Belum optimalnya kapasitas pelatihan oleh BLK

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Tingginya Alih fungsi hutan dan lahan	Terbatasnya pengawasan kawasan lindung
			Rendahnya kualitas penghijauan dan reboisasi
			Belum tuntasnya tata batas kawasan
		Tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik	Rendahnya pengawasan dan pengendalian pencemaran di daerah tangkapan sumber air baku
			Rendahnya pengelolaan air limbah dan industri
			Terbatasnya ketersediaan pengelolaan limbah domestik (IPAL)
			Tingginya masyarakat yang bermukim di bantaran sungai
		Tingginya Pencemaran Udara	Meningkatnya Polusi Kendaraan bermotor di wilayah perkotaan
			Tingginya kebakaran hutan
			Tingginya aktivitas industri dalam bahan bakar diesel
		Masih tingginya angka emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			Masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah
			Masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi
			Masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%
Kearsipan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Belum terintegrasinya sistem arsip daerah	Belum optimalnya kapasitas tenaga SDM kearsipan perangkat daerah
			Belum optimalnya sistem informasi kearsipan
Statistik	Belum optimalnya pemanfaatan data pembangunan daerah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik daerah	Belum optimalnya dokumentasi capaian pembangunan daerah
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data statistik sektoral
			Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan PPID

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral.

Tabel 4.3.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pilihan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah	Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah	Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan
			Terbatasnya Ketersediaan benih unggul
			Belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit)
		Masih rendahnya produksi padi	Luas tanam belum memadai
			Produktivitas masih belum optimal
			Jumlah keluarga petani semakin menurun
			Semakin meluasnya alih fungsi lahan pertanian
		Diversifikasi pangan belum optimal	Teknologi diversifikasi pangan (beras) masih belum optimal
			Promosi pangan non beras belum optimal
Kelautan dan Perikanan	Kontribusi Sub Sektor Perikanan (Pertanian dalam arti luas) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah	Rendahnya produksi perikanan	Terbatasnya Benur unggul
			Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan metode penangkapan ikan secara tradisional
			Masih rendahnya pengembangan budidaya perikanan darat
			Belum optimalnya Kawasan perlindungan perikanan
			Terminal pendaratan ikan belum merata
Kehutanan	Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Ekspor masih dalam bentuk bahan mentah Kayu Alam	Belum adanya regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			menurunnya produktivitas kayu alam pada kawasan hutan
			Belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah.)	Masih rendah pengolahan hasil hutan kayu
			Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan selain kayu
			Belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu
		Akses masyarakat disekitar kawasan hutan belum memadai	Belum terselesaikannya konflik tenurial masyarakat
			Lambannya proses persetujuan perijinan perhutanan sosial
Pariwisata	kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah	Pengembangan destinasi pariwisata belum memadai	Minimnya SDM spesialisasi keahlian bidang pariwisata
			Inovasi pengemasan destinasi pariwisata masih rendah
			Sarana dan prasarana pendukung pariwisata belum terbangun secara optimal
			Akses menuju destinasi belum memadai
Perdagangan	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB belum optimal	Daya saing produk perdagangan antar daerah masih rendah	Rendahnya kualitas produk
			Belum optimalnya kuantitas dan kontiuitas produk
		Masih terbatasnya pasar produk di luar daerah	Belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan
Perindustrian	Kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas terhadap PDRB belum optimal	Lambatnya pertumbuhan investasi Industri Kecil Menengah	Inovasi pengembangan produk olahan masih rendah
			Terbatasnya kemampuan Penguasaan dan pemilikan teknologi
			Terbatasnya akses permodalan
			Integrasi proses hulu-hilir antar sektor belum optimal
Energi Sumber Daya Mineral	Belum memadainya cakupan layanan ketenagalistrikan	Rendahnya akses ketenagalistrikan pada wilayah 3T	Belum optimalnya ketersediaan jaringan kelistrikan
			Masih terbatasnya daya listrik yang tersedia
			Keterjangkauan pembangkit listrik besar terbatas terhadap wilayah 3T
			Belum optimalnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar dapat berjalan baik. Sistem tata kelola pemerintahan dibentuk oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Pelaksanaan fungsi penunjang yang membangun tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Belum efektifnya perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penetapan indikator kinerja yang berorientasi pada manfaat (Outcome)	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti
			Terbatasnya data dan informasi
		Belum optimalnya pengendalian realisasi pelaksanaan pembangunan	Lambatnya pelaporan realisasi target pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian	Kualitas hasil penelitian belum memenuhi kebutuhan penyelesaian masalah pembangunan
Keuangan	Belum optimalnya Kemandirian Fiskal	Masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD)	Belum optimalnya upaya penggalan sumber-sumber PAD lainnya
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD
Pengawasan	Belum optimalnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Belum optimalnya kapasitas pengadministrasian aset daerah hasil pelimpahan kewenangan
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah
			Belum proporsionalnya tenaga auditor dengan obyek pengawasan
		Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik	Pelaksanaan SPM yang belum dikendalikan dengan baik
			Belum optimalnya penyelenggaraan survei IKM pada berbagai unit pelayanan
		Belum optimalnya upaya penerapan zona integritas pada perangkat daerah	Belum optimalnya komitmen aparatur dalam penerapan zona integritas
			Belum optimalnya penerapan survei indeks persepsi korupsi.
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Masih rendahnya profesionalitas aparatur	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang belum diimplementasikan secara optimal
			Belum optimalnya penyelenggaraan sertifikasi profesi
		Belum optimalnya penyelenggaraan diklat	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat daerah
			Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan prasarana

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penyelenggaraan diklat
		Penempatan pegawai ASN masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki	Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian
Kesekretariatan	Belum optimalnya fungsi Koordinasi dan Integrasi pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya produktivitas DPRD dalam merumuskan raperda	Belum optimalnya fasilitasi legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat
		Belum optimalnya Integrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Lambatnya proses penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah
		Belum optimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	Belum optimalnya pembinaan administrasi pemerintahan pada kabupaten/kota

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan.

4.2.1 Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals*. Melalui mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Negara-negara dalam organisasi PBB berkomitmen untuk berupaya mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

B. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki dukungan terhadap implementasi industri. Dengan ketersediaan

teknologi tersebut, kemanfaatan dapat diambil oleh pemerintah, karena informasi dapat terdistribusi dan diterima dengan lebih cepat. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk mendukung partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

C. Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Ekonomi hijau mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengenyampingkan kepentingan ekologi dan sosial-budaya masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam ekonomi hijau tersebut menjadi pedoman perubahan paradigma pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus didukung keberlanjutan ekologi. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Misalnya pada sektor perkebunan, dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Pada sektor perikanan dilakukan dengan mendorong budidaya perikanan darat yang tidak membuka seluas-luasnya Kawasan berhutan, namun dilakukan dengan integrasi perikanan dan hutan (*aquasilviculture*), serta menetapkan

dan mengelola kawasan perlindungan bagi perbenihan biota air di alam (*reservat*).

D. Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (Paris Agreement)

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

4.2.2 Isu Nasional

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan periode 2015-2019, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWA CITA ini kemudian dipertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

Tabel 4.5
Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025.

Arah kebijakan nasional tersebut menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023.

4.2.3 Isu Strategis Kewilayahan

Perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan dimana kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata antara wilayah satu dengan wilayah lain. Kemajuan pembangunan di kawasan pesisir terutama Balikpapan, Samarinda dan Bontang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya, sementara sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau terdepan, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, air bersih dan sanitasi, keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Isu strategis kewilayahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah, antara lain :

1. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Tingkat keberhasilan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Kalimantan Timur masih rendah, hanya 2 KSP yang berkembang dengan pesat dari 7 KSP yang ada, yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Bontang dan Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda. Infrastruktur pendukung konektifitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan di beberapa KSP masih belum optimal, terutama terkait dengan jaringan air bersih, telekomunikasi dan transportasi.

Penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektifitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan. Di samping itu pula pengembangan sosial ekonomi perdesaan, wilayah pedalaman dan tertinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konektifitas antar kawasan.

2. Peningkatan Daya Saing Daerah

Kebutuhan akan peningkatan daya saing daerah dilatarbelakangi oleh pengalaman perekonomian Kalimantan Timur yang menghadapi tantangan cukup berat, dimana pada periode tahun 2015-2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang sangat tajam. Rendahnya kondisi daya saing daerah disebabkan oleh pengaruh eksternal buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Disamping itu, pengaruh internal terhadap rendahnya daya saing daerah antara lain :

- Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya kordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.

- Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
- Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (borderless). Kemampuan bersaing (daya saing) menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan, inovasi, dan antisipasi merupakan tiga kunci pokok dalam menghadapi globalisasi. Keunggulan berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, inovasi merupakan perubahan strategis yang dilakukan, serta antisipasi adalah bagaimana mengantar pelayanan sesuai timing-nya.

Peningkatan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peningkatan daya saing dilakukan melalui upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam mendukung kemandirian daerah, tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki, meliputi :

- Memperkuat kelembagaan dan tatakelola pemerintahan daerah meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan inovasi pemerintahan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah baru dan pengembangan investasi, penataan pola hubungan kerja sama antara Pusat-daerah dan antar daerah, serta kolaborasi multipihak swasta.

- Meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan daya saing di pasar nasional dan internasional dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di daerah pedalaman dan tertinggal.

3. Pemanfaatan Ruang

Daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (*Carrying Capacity*) menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan strategis untuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami Konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai $\pm 88,47$ % lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Disamping itu, permukiman di kawasan perdesaan dalam kawasan hutan, perkebunan besar, dan konsesi pertambangan tidak dapat optimal dalam mengelola lahan dan akses pelayanan infrastruktur dasar juga terbatas. Penduduk miskin Kalimantan Timur sebagian besar berada dalam kawasan yang tumpang tindih tersebut. Sementara dilain pihak, Pemerintahan Desa belum dapat optimal melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur melalui dana desa pada kawasan-kawasan tersebut. Degradasi lingkungan juga semakin meningkat, dimana kejadian bencana semakin sering terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti banjir dan tanah longsor.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu diarahkan pada penataan kembali pola pengelolaan Sumber Daya Alam melalui pengendalian perijinan investasi dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber daya alam dan keragaman lingkungan hidup, penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Dengan adanya investasi pemanfaatan ruang yang mampu mengolah sumber daya alam secara lestari, maka ekonomi daerah akan berputar, ada penyerapan tenaga kerja, ada nilai tambah, ada profit, ada pajak dan ada multiplier effect untuk daerah, yang selanjutnya diharapkan akan mampu mempersempit ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Harmonisasi Peraturan Perundangan terkait pemanfaatan ruang merupakan faktor kunci yang mampu mendorong upaya penurunan ketimpangan antar wilayah.

4.3 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa permasalahan utama pembangunan yang mengemuka berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan masalah per-urusan pemerintahan.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sinergitas target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Target pembangunan nasional, isu internasional, dan kesepakatan regional-global.

Berikut adalah isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan

tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing.

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang.

2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi

dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya, dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah. Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh

infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi transformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum

yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang professional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan social. Berdasarkan capaian Pembangunan Kalimantan Timur , masih banyak urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Selain itu, belum seluruh kementerian teknis menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM.

Sementara di daerah, Kalimantan Timur juga menghadapi masalah dan isu strategis dalam penerapan SPM sebagai berikut :

1. Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapaian SPM belum dipetakan secara menyeluruh;
2. Kapasitas Daerah dalam pengintegrasiaan rencana dan dokumen perencanaan SPM masih dihadapkan pada permasalahan lemahnya pemahaman aparatur daerah;
3. Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
4. Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian informasi masih dihadapkan pada kurangnya data dan informasi terkait pencapaian indikator-indikator kinerja SPM.